

**STRATEGI OPTIMALISASI PERANAN POLISI KEHUTANAN  
DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL LOGGING*  
DI KAWASAN TAMAN NASIONAL  
GUNUNG PALUNG**  
*(Optimization Strategy The Role Of The Forest Ranger In Tackling Illegal Logging  
In The Area Gunung Palung National Park)*

**Cucu Rochdat, Bachrun Nurdjali, Ganjar Oki W**  
Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura Pontianak Kalimantan Barat  
Email : aldavinrochdat@yahoo.co.id

**ABSTRACT**

*TNGP forest ranger has made efforts in combating illegal logging, yet there still found any illegal logging that activity. This study aims to identify environmental conditions inside (internal) and outside (external) on the countermeasure illegal logging by TNGP forest ranger, and find alternative strategy which concerns the prevention of illegal logging by TNGP forest ranger. Methods used is observation with interview assisted guide interview. Primary data is sourced from the 17 respondents sample of 11 research object as a purposive sampling. Results of the study and analyze issues or alternative strategies do with SWOT analysis, IFE and EFE were then formulated with SWOT matrix. Research internal, strength factor with the highest weighting, namely the existence of a strategy for tackling illegal logging was done by TNGP forest ranger. A factor of weakness namely forest ranger not comparable to TNGP space. External identification, opportunities factor with the highest weighting namely having authority full given ministry of forestry in addressing all cases criminal act forestry happened in TNGP area. The threat factor is the factors are interest to develop its territory governments. An alternative strategy found that is optimize and increase the capability of forest ranger , maximize of facilities infrastructures and utilizing obtain additional from NGO, illegal logging preventive improvement program based on the authority of forest ranger, maintain and develop the program handling the illegal logging that already exist, maximize the participation of indigenous people, and integrating all components related stakeholders through the opportunities of Presidential Instruction No. 4/2005.*

*Keywords: Strategy, Forest Ranger, Illegal Logging.*

**PENDAHULUAN**

Peran Polisi Kehutanan (Polhut) sangat penting sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan hutan yang bersifat *pre emtif, preventif, represif* dan *yudisif* (Dirjen PHKA, 2011). Berdasarkan hasil Operasi Wanalaga, patroli rutin dan operasi fungsional oleh Polhut selama tahun 2003 – 2004, telah ditangkap tersangka sebanyak 30 orang untuk 11 kasus, dengan barang bukti berupa kayu sebanyak 23.880 m<sup>3</sup> dan 10.616 batang. Sebanyak 10.230 batang diantaranya dirusak dengan cara

dilakukan pemakuan/ pemberian paku pada kayu-kayu tersebut, dimusnahkan dengan dipotong-potong menggunakan chain saw, dan dibakar (RPJM TNGP (2010). Sedangkan pada tahun 2010 di Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Sukadana TNGP jumlah pelaku yang ditemukan sebanyak 27 orang (diperingatkan dan disuruh keluar dari dalam kawasan) dengan barang bukti kayu sebanyak 3.879 batang (646,5 m<sup>3</sup>), dan pada tahun 2011 (SPTN Wilayah I Sukadana TNGP) pelaku yang ditemukan

sebanyak 96 orang (diperingatkan dan disuruh keluar dari dalam kawasan) dengan barang bukti kayu sebanyak 3.645 batang (607,5 m<sup>3</sup>) (SPTN I TNGP, 2012).

Banyaknya kasus *illegal logging* yang telah ditangani Polhut TNGP merupakan keberhasilan dari salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan, akan tetapi dengan masih ditemukannya pelaku *illegal logging* dan barang bukti kayu pada tahun 2011 dan 2012 ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi Polhut TNGP.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengidentifikasi kondisi lingkungan di dalam (internal) dan di luar (eksternal) terhadap penanggulangan *illegal logging* oleh Polhut TNGP.
- b. Menemukan alternatif strategi yang menyangkut upaya penanggulangan *illegal logging* oleh Polhut TNGP.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di Taman Nasional Gunung Palung dan beberapa stakeholder di wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara yang terkait (Kepolisian, tokoh masyarakat adat, masyarakat sekitar kawasan TNGP dan LSM ) dengan waktu penelitian selama 4 minggu mulai dari tanggal 15 April 2013 hingga 15 Mei 2013.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : alat tulis-menulis, buku catatan, kamera, panduan wawancara, alat perekam dan kalkulator. Objek penelitian ini yaitu Kepala Balai Taman Nasional Gunung

Palung, Kepala Seksi Wilayah I TNGP, Kepala Seksi Wilayah II TNGP, Kasat Polhut Taman Nasional Gunung Palung, Anggota Polhut Taman Nasional Gunung Palung, Kepolisian, Aparat Pemerintahan (Kepala Desa), Pihak Swasta, Tokoh Masyarakat Adat, LSM dan masyarakat sekitar TNGP.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dengan wawancara yang dibantu panduan wawancara. Adapun penelitian ini adalah penelitian terapan (*Aplied Research*) dengan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif melalui pendekatan pada optimalisasi peranan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Palung untuk mengungkap isu-isu strategis secara intensif, mendalam dan komprehensif. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Sugiyono (2002), bahwa pendekatan metode kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alami (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan aspek-aspek berdasarkan fakta, dengan langkah penelitian adalah telaah pustaka dan penelitian lapangan.

Pengumpulan data adalah hasil observasi dan wawancara. Data yang diambil adalah data primer yang bersumber dari 17 responden sampel dari 11 objek penelitian secara *purposive sampling*. Hasil kajian dan analisis isu atau alternatif strategi dilakukan dengan analisis *SWOT*, *IFE* dan *EFE* yang kemudian diformulasikan dengan matriks *SWOT*.

Dari data primer yang diperoleh kemudian di analisis dengan analisis *SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat Analysis)*, sehingga diperoleh kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dari lingkungan internal, juga peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*) dari lingkungan eksternal. Selanjutnya membuat tabel *Internal Factor Evaluation (IFE)* dan *External Factor Evaluation (EFE)* dimana pembobotan nilai hasil berdasarkan penilaian terhadap organisasi dan dilakukan dengan *pairwise comparison* yang diolah menggunakan software *Expert Choice 2000*. Dari tabel *IFE* dan *EFE* kemudian dianalisis dengan *Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)* dan *External Factor Evaluation (EFE)* dimana pada *matriks IE* diberikan rating 1-4 pada setiap isu dimana 4 = sangat bagus, 3 = di atas rata-rata, 2 = respon rata-rata dan 1 = di bawah rata-rata. Matriks *IE* dapat

menentukan posisi sebuah organisasi, dimana posisi organisasi dapat berada pada salah satu dari sembilan sel sel yang ada. Kesembilan sel tersebut dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yang mempunyai dampak strategi yang berbeda. Pertama, sel I, II dan IV disebut strategi tumbuh dan bina. Kedua, sel III, V dan VII disebut strategi pertahankan dan pelihara. Ketiga, sel VI, VIII dan IX disebut strategi panen atau divestasi (David, 2002).

Selanjutnya adalah analisis dengan matriks *SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat Analysis)*, yang merupakan salah satu alat analisis untuk menemukan alternatif strategi yang nantinya digunakan bagi penemuan strategi optimalisasi peranan Polisi Kehutanan dalam menanggulangi *illegal logging* di Taman Nasional Gunung Palung. Diagram Matriks *SWOT* dapat dilihat pada Gambar 1.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>(IFAS)</b> ⇨<br>⇩<br><b>(EFAS)</b>         | <b>KEKUATAN (S)</b><br>Identifikasi Kekuatan                            | <b>KELEMAHAN (W)</b><br>Identifikasi Kelemahan                            |
| <b>PELUANG (O)</b><br>Identifikasi Kesempatan | <b>STRATEGI (SO)</b><br>Menggunakan Kekuatan Untuk menangkap kesempatan | <b>STRATEGI (WO)</b><br>Mengatasi kelemahan dengan kesempatan             |
| <b>ANCAMAN (T)</b><br>Identifikasi Ancaman    | <b>STRATEGI (ST)</b><br>Menggunakan Kekuatan Untuk Menghindari Ancaman  | <b>STRATEGI (WT)</b><br>Meminimalkan Kelemahan dengan Menghindari Ancaman |

Sumber : Wahyudi, Agustinus (1996)

Gambar 1. Diagram Matrik *SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treat)*  
*(Diagrams Matriks of SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treat))*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis *Matriks Internal Factor Evaluation (IFE)* dan *External*

*Factor Evaluation (EFE)* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Internal Factor Evaluation (IFE)* dan *Eksternal Factor Evaluation (EFE)* (*Internal Factor Evaluation (IFE) and Eksternal Factor Evaluation (EFE)*)

| No                                    | Faktor Lingkungan Internal  | Bobot        | Rating | Skor         |
|---------------------------------------|---|--------------|--------|--------------|
| <b>A. Kekuatan</b>                    |   |              |        |              |
| 1.                                    | Terdapat potensi sumber daya berupa personil Polhut yang terdidik dan terlatih, serta berkedudukan di resort-resort yang bisa memudahkan dalam pemantauan dan penanganan khususnya <i>illegal logging</i> .   | 0,186        | 4      | 0,744        |
| 2.                                    | Terdapatnya sarana dan prasarana yang cukup memadai, yaitu sarana transportasi darat, sarana transportasi air, sarana patroli udara, kaporal pribadi, sarana komunikasi dan sarana navigasi.  | 0,264        | 4      | 1,056        |
| 3.                                    | Polhut memiliki payung hukum yang cukup kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dari peraturan di bidang Kehutanan dan peraturan di bidang Kepolisian.  | 0,245        | 3      | 0,762        |
| 4.                                    | Adanya strategi penanggulangan <i>illegal logging</i> yang telah dilakukan oleh Polhut TNGP, yaitu : Peningkatan kemampuan aparatur dan organisasi, Peningkatan pengamanan kawasan hutan, Penegakan hukum bidang kehutanan, Peningkatan kepedulian masyarakat, Peningkatan kerjasama dan kemitraan.   | <b>0,305</b> | 4      | 1,22         |
| <b>Total nilai faktor kekuatan</b>    |   |              |        | <b>3,782</b> |
| <b>B. Kelemahan</b>                   |   |              |        |              |
| 1.                                    | Jumlah personil Polhut yang tidak sebanding dengan luasan kawasan hutan TNGP.   | <b>0,250</b> | 2      | 0,5          |
| 2.                                    | Kurangnya jumlah PPNS dan masih kurang maksimalnya kemampuan dari personil PPNSnya itu sendiri.   | 0,151        | 2      | 0,302        |
| 3.                                    | Adanya oknum anggota Polhut yang tidak sesuai dengan aturan, seperti membocorkan informasi mengenai kegiatan operasi yang akan dilakukan oleh Polhut TNGP, sehingga mengakibatkan terganggunya penanganan <i>illegal logging</i> yang terjadi.  | 0,055        | 1      | 0,055        |
| 4.                                    | Adanya sarana prasarana yang masih kurang.  | 0,124        | 2      | 0,248        |
| 5.                                    | Kurangnya koordinasi dengan stake-holder terkait.   | 0,175        | 1      | 0,175        |
| 6.                                    | Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan.   | 0,202        | 2      | 0,404        |
| 7.                                    | Tidak adanya kerjasama yang berkelanjutan antara Polhut dengan masyarakat adat dalam upaya peningkatan penanggulangan <i>illegal logging</i> .  | 0,043        | 2      | 0,086        |
| <b>Total nilai faktor kelemahan</b>   |   |              |        | <b>1,77</b>  |
| <b>NILAI POSISI INTERNAL</b>          |   |              |        | <b>2,012</b> |
| <b>C. Faktor Lingkungan Eksternal</b> |   |              |        |              |
| <b>1. Peluang</b>                     |   |              |        |              |
| 1.                                    | Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Inpres No. 4 tahun 2005, Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2005, kebijakan Kapolri tentang sasaran prioritas operasi kepolisian dan kebijakan yang sama dari Panglima TNI dan Jaksa Agung RI dan Ketua MA juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan. | 0,274        | 4      | 1,096        |
| 2.                                    | Memiliki kewenangan penuh yang diberikan Kementerian Kehutanan dalam menangani semua kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di dalam kawasan TNGP.  | <b>0,312</b> | 4      | 1,248        |
| 3.                                    | Kementerian Kehutanan setiap tahunnya merekrut dan mendidik Polisi Kehutanan baru, dalam rangka peningkatan usaha pengamanan dan perlindungan hutan.  | 0,103        | 4      | 0,412        |
| 4.                                    | Akan adanya dukungan dari pelaku usaha air kemasan untuk  | 0,056        | 3      | 0,168        |

|                   |   |              |   |              |
|-------------------|---|--------------|---|--------------|
|                   | bekerja sama dalam menangani masalah <i>illegal logging</i> .   |              |   |              |
| 5.                | Adanya masyarakat adat, serta masih kuatnya dukungan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan seperti pengelolaan hutan yang ada di sekitar masyarakat.   | 0,157        | 4 | 0,628        |
| 6.                | Adanya dukungan moril dan materil dari LSM yang bergerak di bidang kehutanan dalam membantu kelancaran penanganan <i>illegal logging</i> .  | 0,098        | 3 | 0,294        |
|                   | <b>Total nilai faktor peluang</b>   |              |   | <b>3,846</b> |
| <b>D. Ancaman</b> |   |              |   |              |
| 1.                | Adanya faktor kepentingan Pemda untuk mengembangkan daerahnya dimana kebutuhan akan bahan baku untuk pembangunan kantor-kantor, pemukiman, pertokoan dll memerlukan kayu yang tidak sedikit dan kadangkala dipenuhi dari kayu <i>illegal logging</i> .  | <b>0,314</b> | 1 | 0,314        |
| 2.                | Adanya Pelaku usaha kayu <i>illegal</i> melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melakukan kegiatan <i>illegal logging</i> dan kemudian menampung kayu <i>illegal</i> tersebut.  | 0,041        | 1 | 0,041        |
| 3.                | <i>Illegal logging</i> merupakan salah satu mata pencaharian bagi sebagian masyarakat dan menjadi sumber perekonomian kehidupan masyarakat.   | 0,187        | 2 | 0,374        |
| 4.                | Adanya industri kayu yang menampung kayu <i>illegal</i> .   | 0,081        | 1 | 0,081        |
| 5.                | Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar kawasan dalam penanganan masalah <i>illegal logging</i> .  | 0,275        | 2 | 0,55         |
| 6.                | Kemiskinan dan pengangguran memberikan pengaruh negatif sosial budaya masyarakat, antara lain menimbulkan sikap-sikap individualistik, materialistik, sikap tersebut terlihat dalam melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan serta mendorong percepatan pengrusakan hutan melalui aktifitas <i>illegal logging</i> | 0,102        | 1 | 0,102        |
|                   | <b>Total nilai faktor ancaman</b>   |              |   | <b>1,462</b> |
|                   | <b>NILAI POSISI EKSTERNAL</b>   |              |   | <b>2,384</b> |

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa faktor kekuatan yang memiliki bobot tertinggi yaitu adanya strategi penanggulangan *illegal logging* yang telah dilakukan oleh Polhut TNGP (0,305), sedangkan untuk faktor kelemahan adalah jumlah personil Polhut yang tidak sebanding dengan luasan kawasan hutan TNGP (0,250). Faktor peluang yang memiliki bobot tertinggi yaitu memiliki kewenangan penuh yang diberikan Kementerian Kehutanan dalam menangani semua kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di dalam kawasan TNGP (0,312). Adapun untuk faktor ancaman adalah adanya faktor kepentingan Pemda untuk mengembangkan daerahnya dimana

kebutuhan akan bahan baku untuk pembangunan kantor-kantor, pemukiman, pertokoan dll memerlukan kayu yang tidak sedikit dan kadangkala dipenuhi dengan *illegal logging* (0,314).

Total nilai faktor kekuatan yang diperoleh adalah 3,782 dan total nilai faktor kelemahan adalah 1,77. Hal ini memperlihatkan bahwa kekuatan internal Polhut TNGP lebih besar daripada kelemahan internal Polhut TNGP, sedangkan hasil evaluasi faktor eksternal memperlihatkan bahwa total nilai peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Polhut TNGP sebesar 3,846 dan total nilai ancaman sebesar 1,462. Hal ini memperlihatkan bahwa Polhut

TNGP memiliki peluang eksternal yang lebih besar dibandingkan ancaman eksternal yang dihadapinya. Berdasarkan evaluasi faktor internal dan eksternal dapat diketahui bahwa posisi Polhut TNGP berada pada sel V, dimana nilai posisi internal (total nilai kekuatan-kelemahan) adalah 2,012 dan nilai posisi eksternal (total nilai peluang-ancaman) adalah 2,384. Posisi

Polhut TNGP pada sel V menunjukkan strategi pertahankan dan pelihara (David, 2002). Polhut TNGP harus mempertahankan dan memelihara program-program maupun kegiatan yang telah berjalan saat ini, pengembangan program maupun kegiatan adalah strategi yang terbanyak dilakukan pada tipe strategi ini.

|                              |                    | TOTAL NILAI FAKTOR INTERNAL |                    |                   |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
|                              |                    | Kuat<br>3.0-4.0             | Sedang<br>2.0-2.99 | Lemah<br>1.0-1.99 |
| TOTAL NILAI FAKTOR EKSTERNAL | Tinggi<br>3.0-4.0  | I                           | II                 | III               |
|                              | Sedang<br>2.0-2.99 | IV                          | Polhut TNGP<br>V   | VI                |
|                              | Lemah<br>1.0-1.99  | VII                         | VIII               | IX                |

Gambar 2. Posisi matriks *IFE* dan *EFE* Polhut TNGP  
(*Position IFE and EFE Matriks TNGP Forest Ranger*)

Posisi Polhut TNGP jika diaplikasikan dalam matriks SWOT adalah strategi S-O, dimana Polhut TNGP menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk

memanfaatkan peluang yang ada. Perumusan alternatif strategi dengan menggunakan matriks SWOT dapat dilihat pada Gambar 2.

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p><b>EKSTERNAL</b></p> <p><b>INTERNAL</b></p> | <p><b>Peluang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Inpres No. 4 tahun 2005, Instruksi Mendagri No. 3 Tahun 2005, kebijakan Kapolri tentang sasaran prioritas operasi kepolisian dan kebijakan yang sama dari Panglima TNI dan Jaksa Agung RI dan Ketua MA juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan</li> <li>2. Memiliki kewenangan penuh yang diberikan Kementerian Kehutanan dalam menangani semua kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di dalam kawasan TNGP.</li> <li>3. Kementerian Kehutanan setiap tahunnya merekrut dan mendidik Polisi Kehutanan baru, dalam rangka peningkatan usaha pengamanan dan perlindungan hutan</li> <li>4. Akan adanya dukungan dari pelaku usaha air kemasan untuk bekerja sama dalam menangani masalah <i>illegal logging</i></li> <li>5. Adanya masyarakat adat, serta masih kuatnya dukungan masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan seperti pengelolaan hutan yang ada di sekitar masyarakat</li> <li>6. Adanya dukungan moril dan materil dari LSM yang bergerak di bidang kehutanan dalam membantu kelancaran penanganan <i>illegal logging</i>.</li> </ol> | <p><b>Ancaman</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya faktor kepentingan Pemda untuk mengembangkan daerahnya dimana kebutuhan akan bahan baku untuk pembangunan kantor-kantor, pemukiman, pertokoan dll memerlukan kayu yang tidak sedikit dan kadangkala dipenuhi dari kayu <i>illegal logging</i></li> <li>2. Adanya Pelaku usaha kayu <i>illegal</i> melalui pemberian modal usaha kepada masyarakat sekitar kawasan hutan untuk melakukan kegiatan <i>illegal logging</i> dan kemudian menampung kayu <i>illegal</i> tersebut</li> <li>3. <i>Illegal logging</i> merupakan salah satu mata pencaharian bagi sebagian masyarakat dan menjadi sumber perekonomian kehidupan masyarakat.</li> <li>4. Adanya industri kayu yang menampung kayu <i>illegal</i></li> <li>5. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar kawasan dalam penanganan masalah <i>illegal logging</i>.</li> <li>6. Kemiskinan dan pengangguran memberikan pengaruh negatif sosial budaya masyarakat, antara lain menimbulkan sikap-sikap individualistik, materialistik, sikap tersebut terlihat dalam melakukan eksploitasi hutan secara besar-besaran tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan serta mendorong percepatan pengrusakan hutan melalui aktifitas <i>illegal logging</i>.</li> </ol> |
|--|--|--|

|   |  |   |
|---|--|---|
| <p><b>Kekuatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat potensi sumber daya berupa personil Polhut yang terdidik dan terlatih, serta berkedudukan di resort-resort yang bisa memudahkan dalam pemantauan dan penanganan khususnya <i>illegal logging</i>.</li> <li>2. Terdapatnya sarana dan prasarana yang cukup memadai, yaitu sarana transportasi darat, sarana transportasi air, sarana patroli udara, kaporal pribadi, sarana komunikasi dan sarana navigasi.</li> <li>3. Polhut memiliki payung hukum yang cukup kuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dari peraturan di bidang Kehutanan dan peraturan di bidang Kepolisian.</li> <li>4. Adanya strategi penanggulangan <i>illegal logging</i> yang telah dilakukan oleh Polhut TNGP, yaitu : Peningkatan kemampuan aparatur dan organisasi, Peningkatan pengamanan kawasan hutan, Penegakan hukum bidang kehutanan, Peningkatan kepedulian masyarakat, Peningkatan kerjasama dan kemitraan</li> </ol> | <p><b>1. Strategi Memanfaatkan Kekuatan dan Mengisi Peluang (SO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengoptimalkan serta meningkatkan kemampuan personil Polhut TNGP dalam penanggulangan <i>illegal logging</i>.</li> <li>b. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Polhut serta memanfaatkan peluang mendapatkan tambahan sarana dan prasarana dari pihak LSM..</li> <li>c. Program peningkatan penanggulangan <i>illegal logging</i> di TNGP, berdasarkan kewenangan yang dimiliki Polhut</li> <li>d. Mempertahankan dan mengembangkan program penanganan <i>illegal logging</i> yang sudah ada.</li> <li>e. Memaksimalkan peran serta Masyarakat Adat dalam mengatasi masalah <i>illegal logging</i></li> <li>f. Mengintegrasikan semua komponen stake holder terkait melalui peluang Inpres No. 4 Tahun 2005, mengenai keikutsertaan semua pihak dalam mengatasi penanganan masalah <i>illegal logging</i> .</li> </ol> | <p><b>2. Strategi Memanfaatkan Kekuatan dan Mengatasi Ancaman (ST)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan strategi penanggulangan <i>illegal logging</i> terhadap kepentingan Pemda yang menyebabkan terjadinya <i>illegal logging</i></li> <li>b. Peningkatan penegakan hukum kepada para pelaku <i>illegal logging</i> sampai kepada pemodal dan pihak yang terlibat.</li> <li>c. Mengalihkan tekanan <i>illegal logging</i> terhadap kawasan hutan dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui perangkat hukum adat setempat.</li> <li>d. Peningkatan strategi penanggulangan <i>illegal logging</i> terhadap para pelaku industri yang menampung kayu <i>illegal</i></li> <li>e. Melakukan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat tentang penanganan <i>illegal logging</i></li> <li>f. Bekerja sama dengan pihak terkait untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar kawasan hutan sebagai pengganti aktifitas <i>illegal logging</i></li> </ol> |
| <p><b>Kelemahan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah personil Polhut yang tidak sebanding dengan luasan kawasan hutan TNGP.</li> <li>2. Kurangnya jumlah PPNS dan masih kurang maksimalnya kemampuan dari personil PPNSnya itu sendiri.</li> <li>3. Adanya oknum anggota Polhut yang tidak sesuai dengan aturan, seperti membocorkan informasi mengenai kegiatan operasi yang akan dilakukan oleh Polhut TNGP, sehingga mengakibatkan terganggunya penanganan <i>illegal logging</i> yang terjadi.</li> <li>4. Adanya sarana prasarana yang masih kurang.</li> <li>5. Kurangnya koordinasi dengan stake-holder terkait.</li> <li>6. Kurangnya sosialisasi yang berkelanjutan.</li> <li>7. Tidak adanya kerjasama yang berkelanjutan antara Polhut dengan Masyarakat Adat dalam upaya peningkatan penanganan <i>illegal logging</i>.</li> </ol>  | <p><b>4. Strategi Mengatasi Kelemahan dan Mengisi Peluang (WO)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengusulkan penambahan personil Polhut TNGP sesuai dengan luas kawasan</li> <li>b. Mengusulkan penambahan PPNS dan memaksimalkan PPNS yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya.</li> <li>c. Peningkatan personil Polhut dengan penindakan terhadap oknum anggota yang melakukan pelanggaran serta pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi.</li> <li>d. Penambahan sarana dan prasarana yang masih kurang dan memanfaatkan peluang mendapatkan tambahan sarana dan prasarana dari pihak LSM</li> <li>e. Perlu sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan.</li> <li>f. Peningkatan koordinasi dan adanya tindakan nyata dengan stakeholder terkait</li> <li>g. Perlu kerjasama yang berkelanjutan antara Polhut dengan masyarakat adat.</li> </ol>   | <p><b>3. Strategi Mengatasi Kelemahan dan Menghadapi Ancaman (WT)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan Koordinasi dan supervisi secara intensif antar instansi terkait dalam menjalankan program penanganan <i>illegal logging</i>.</li> <li>b. Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan penanganan <i>illegal logging</i> untuk menimbulkan kesadaran hukum serta menimbulkan rasa memiliki terhadap hutan.</li> </ol>   |

Gambar 3. Diagram Matriks SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Treat*) Optimalisasi Peranan Polhut Dalam Menanggulangi *Illegal Logging* di TNGP (*Diagrams Matriks of SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treat) optimization of Forest Ranger Role in tackling Illegal Logging in TNGP*)



Berdasarkan kondisi dan analisis matriks SWOT, maka alternatif strategi yang dapat dilaksanakan oleh Polhut TNGP dalam menanggulangi *illegal logging* saat ini adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan serta meningkatkan kemampuan personil Polhut TNGP dalam penanggulangan *illegal logging*.
2. Memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki Polhut serta memanfaatkan peluang mendapatkan tambahan sarana dan prasarana dari pihak LSM.
3. Program peningkatan penanggulangan *illegal logging* di TNGP, berdasarkan kewenangan yang dimiliki Polhut.
4. Mempertahankan dan mengembangkan program penanganan *illegal logging* yang sudah ada.
5. Memaksimalkan peran serta Masyarakat Adat dalam mengatasi masalah *illegal logging*.
6. Mengintegrasikan semua komponen stake holder terkait melalui peluang Inpres No. 4 Tahun 2005, mengenai keikutsertaan semua pihak dalam mengatasi penanganan masalah *illegal logging*.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian identifikasi internal, faktor kekuatan dengan bobot tertinggi yaitu adanya strategi penanggulangan *illegal logging* yang telah dilakukan oleh Polhut TNGP, Faktor kelemahan yaitu

jumlah personil Polhut yang tidak sebanding dengan luasan TNGP. Identifikasi eksternal, faktor peluang dengan bobot tertinggi yaitu memiliki kewenangan penuh yang diberikan kementerian kehutanan dalam menangani semua kasus tindak pidana kehutanan yang terjadi di kawasan TNGP. Faktor ancaman yaitu adanya faktor kepentingan Pemda untuk mengembangkan daerahnya.

2. Alternatif strategi yang ditemukan yaitu mengoptimalkan serta meningkatkan kemampuan Polhut, memaksimalkan sarana prasarana yang dimiliki dan memanfaatkan peluang mendapatkan tambahan dari pihak LSM, program peningkatan penanggulangan *illegal logging* berdasarkan kewenangan Polhut, mempertahankan dan mengembangkan program penanganan *illegal logging* yang sudah ada, memaksimalkan peran serta masyarakat adat, dan mengintegrasikan semua komponen stake holder terkait melalui peluang Inpres No. 4 Tahun 2005.

### B. Saran

1. Penanggulangan *illegal logging* merupakan suatu tugas dan tanggung jawab semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk itu dalam pelaksanaan kegiatan dan program penanggulangan *illegal logging* oleh Polhut TNGP perlu melakukan kerja sama dan koordinasi yang intensif, sehingga apa yang menjadi

- tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara maksimal.
2. Untuk menunjang upaya peningkatan penanggulangan *illegal logging* oleh Polhut TNGP perlu adanya penambahan personil anggota dan sarana prasarananya. Hal ini dapat diperoleh dari internal Kementerian Kehutanan maupun dari pihak lain yang bisa memberikan dukungan, seperti LSM.
  3. Untuk melihat ketepatan dan kesesuaiannya alternatif strategi yang ditemukan dalam penelitian ini dengan pelaksanaan penanggulangan *illegal logging* perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji alternatif strategi tersebut, sehingga dapat diketahui alternatif strategi mana yang lebih tepat yang dapat di terapkan oleh Polhut TNGP.

## DAFTAR PUSTAKA

- David, Fred R. 2002. *Manajemen Strategis Konsep : Versi Bahasa Indonesia Edisi Ketujuh*, PT. Prenhalindo. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, 2011. *Buku Saku Polisi Kehutanan*. Jakarta.
- Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Gunung Palung, 2010. *Rencana Pengelolaan Jangka Menengah Taman Nasional Gunung Palung Periode 2010-2011*. Ketapang.
- SPTN I TNGP, 2012. *Buku Rekapitulasi Kegiatan Pengamanan Hutan*. Ketapang.
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta. Bandung.
- Wahyudi, Sri Agustinus. 1996. *Manajemen Strategis: Pengantar Proses Berpikir Stratejik*, Binarupa Aksara. Jakarta.